

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

WHO sebagai Organisasi Internasional yang berfokus kepada kesehatan skala internasional memberikan beberapa rekomendasi untuk negara-negara di dunia yang tergabung dalam PBB guna meningkatkan status kesehatan di negara tersebut. Rekomendasi ini tidak bersifat mengikat, namun sebagai bentuk saran dan acuan dalam sektor kesehatan agar angka kesehatan global memenuhi target yang diharapkan. Karena kesejahteraan sebuah negara juga dilihat dari pembangunan di sektor kesehatan, maka kemudian perlu bagi negara-negara di dunia untuk mengikuti rekomendasi WHO. Salah satu topik yang menjadi prioritas adalah terkait dengan pemberian ASI eksklusif.

Upaya peningkatan tata kelola promosi dan pemberian ASI eksklusif di Indonesia difokuskan kepada penyusunan kebijakan berdasarkan rekomendasi WHO yang memenuhi hak ibu untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayinya tanpa intervensi dalam bentuk apapun. Penyusunan kebijakan ini tentu tidak dapat terlepas dari keterlibatan aktor-aktor baik pemerintah maupun nonpemerintah. Integrasi antar aktor dengan koordinasi dan komunikasi yang kemudian menghasilkan komponen substantif (kebijakan) dan komponen behavioral (perubahan perilaku).

Komponen substantif berupa peraturan dan undang-undang yang menjadi dasar hukum dalam melaksanakan kebijakan tersebut masih memprioritaskan peningkatan fasilitas kesehatan dan juga dukungan bagi ibu menyusui.

Perubahan perilaku yang terjadi berupa penyediaan ruang laktasi di tempat kerja dan sarana publik, dibentuknya Kelompok Pendukung ASI di masyarakat, pelatihan konselor menyusui, diberlakukannya Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi, Penyusunan Pedoman Gizi Seimbang untuk Ibu Hamil dan Ibu Menyusui, hingga pembentukan situs Pelanggaran Kode. Banyaknya perubahan perilaku yang terjadi mengindikasikan keterlibatan banyak pihak untuk bersama-sama mendorong promosi dan pemberian ASI eksklusif di Indonesia.

#### **4.2 Saran**

Untuk meningkatkan cakupan pemberian ASI eksklusif secara menyeluruh dan merata, diperlukan kebijakan yang mengikat juga implementasi yang tepat sehingga tidak terjadi ketimpangan antara kebijakan satu dengan kebijakan yang lain. Upaya efektif yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan meningkatkan akses fasilitas pelayanan kesehatan yang membantu dan mendukung ibu menyusui untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. Selain itu, diperlukan juga kolaborasi dari seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung program ASI eksklusif. Penulis berharap pada penelitian berikutnya, dapat mengikuti pembaharuan terbaru dan meneliti tata kelola yang lebih mendalam ke level daerah.